

ANALISIS MANAJEMEN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR

Ragil Idanja^{1(a)}, Rahmadhona Fitri Helmi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}ragilidanja@gmail.com, ^{b)}rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

08-08-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Manajemen Kinerja, Mitigasi Bencana, Bencana Banjir

Keywords:

Performance Management, Disaster Mitigation, Flood Disaster

Corresponding Author:

ragilidanja@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi Geografis dataran rendah, mengakibatkan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sebagai daerah yang rawan terjadinya banjir. Menangani hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muratara berwenang untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana, termasuk mitigasi bencana banjir sebagai upaya pencegahan guna mengurangi potensi kerugian akibat bencana yang akan datang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan kendala dari manajemen kinerja BPBD Kabupaten Muratara dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muratara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kinerja BPBD Muratara dalam mitigasi bencana banjir dengan empat tahapan yaitu menetapkan pendekatan, kebijakan, strategi dan aktivitas mitigasi bencana banjir belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan belum terdapat program dan kegiatan yang difokuskan untuk mengurangi risiko bencana, masih kurangnya sarana dan prasarana, tidak maksimalnya kegiatan pelatihan SDM, kurangnya pegawai ahli/PNS, belum tersedianya *Early Warning System* (EWS) dan tidak maksimalnya koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders*. Selain itu, juga terdapat kendala yang ditemui seperti belum adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB sangat dibutuhkan dalam mitigasi bencana banjir. Karena memuat kajian risiko bencana, rencana kontingensi, anggaran, program/kegiatan, koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* yang terlibat.

ABSTRACT

Geographical conditions of the lowlands, resulting in North Musi Rawas Regency (Muratara) as an area prone to flooding. Handling this, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Muratara Regency is authorized to carry out disaster management tasks, including flood disaster mitigation as a prevention effort to reduce potential losses due to future disasters. This study aims to analyze the implementation and constraints of the performance management of BPBD Muratara Regency in flood disaster mitigation in Muratara Regency. The results showed that the performance management of BPBD Muratara in flood disaster mitigation with four stages, namely determining approaches, policies, strategies and flood disaster mitigation activities, has not been well implemented. This can be seen by the fact that there are no programs and activities focused on reducing disaster risk, lack of facilities and infrastructure, not maximizing human resource training activities, lack of expert / civil servants, unavailability of Early Warning System (EWS) and not maximizing coordination and collaboration between stakeholders. In addition, there are also obstacles encountered such as the absence of a Disaster Management Plan (RPB). RPB is very much needed in flood disaster mitigation. Because it contains disaster risk assessments, contingency plans, budgets, programs/activities, coordination and collaboration between stakeholders involved.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.110>

PENDAHULUAN

Letak Indonesia berada di Jalur *Ring of Fire* dan Garis Khatulistiwa, berdampak pada tingkat potensi bencana yang signifikan. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari tahun 2018 hingga 2023, menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami sebanyak 18.856 peristiwa bencana hingga tanggal 7 Juni 2023.

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya banjir, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dataran rendah dengan ketinggian wilayah antara 137,50-200 (mdpl). Berikut ini data ketinggian wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 1. Ketinggian Wilayah Kabupaten Muratara

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Ulu Rawas	200
Karang Jaya	165
Rawas Ulu	200
Rupit	165
Karang Dapo	137,50
Rawas Ilir	137,50
Nibung	137,50

Sumber : (BPS, 2021)

Berdasarkan tabel tersebut, menyebabkan air dari Sungai Rupit dan Sungai Rawas meluap ke pemukiman warga sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Berikut ini intensitas peristiwa banjir di Kabupaten Muratara dari tahun 2018-2022 :

Tabel 2. Intensitas Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018-2022

No	Wilayah (Kecamatan)	Tahun	Jumlah Intensitas Bencana Banjir
1	Rawas Ulu	2018 s/d 2022	1 kali
2	Karang Jaya	2018 s/d 2022	3 kali
3	Rupit	2018 s/d 2022	3 kali
4	Karang Dapo	2018 s/d 2022	6 kali
5	Rawas Ilir	2018 s/d 2022	5 kali

Sumber : *Olahan peneliti*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muratara berwenang untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana, termasuk mitigasi bencana banjir. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 secara umum

menjelaskan bahwa mitigasi adalah upaya pencegahan guna mengurangi potensi kerugian akibat bencana yang akan datang. Upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Muratara dalam menanggulangi risiko bencana banjir banjir dengan melakukan *monitoring* debit air sungai Rawas dan Sungai Rupit, memberikan informasi kepada perangkat kecamatan dan desa sebagai sistem peringatan dini, mempersiapkan Tim Respon Cepat/TRC sebagai kesiapsiagaan bencana, koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Muratara sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak banjir serta melakukan pendataan terdampak bencana banjir.

Namun, upaya-upaya tersebut dinilai kurang efektif dalam mengurangi risiko bencana banjir, hal ini ditunjukkan dengan masih kurang baiknya pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (BPBD) di tahun 2021 dan 2022 yang menunjukkan terdapat faktor-faktor penghambat yaitu :

1. Tidak ada program atau kegiatan yang berfokus untuk mengurangi tingkat risiko bencana.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana siaga bencana, peralatan, perlengkapan kebencanaan, rambu-rambu kebencanaan dan tempat penampungan pasca bencana.
3. Sumber daya manusia tidak menerima pelatihan dan arahan teknis guna meningkatkan kemampuannya agar siap, sigap, cepat dan tepat dalam menangani masalah.

Adapun dampak negatif bencana banjir berdasarkan data kerusakan akibat bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang tahun 2022 yaitu sebanyak yaitu 2.850 rumah, 3.333 Kartu Keluarga (KK) dan 10.614 jiwa yang terdampak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukannya sebuah manajemen kinerja yang melibatkan dua hal utama, yaitu proses pelaksanaan kinerja dan pengaturan cara kinerja tersebut dijalankan. Menurut Wibowo (2009), manajemen kinerja bermanfaat terhadap individu, manajer maupun organisasi.

Pengertian manajemen Menurut G.R Terry (1977), Jones & George (2011), Koontz et al. (1993) dan Manulang (2001) dalam (Suprihanto, 2018), dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses, seni, dan ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan

pengendalian untuk mengarahkan anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan semua sumber daya organisasi secara optimal. Manajemen mitigasi bencana adalah salah satu teori manajemen dalam konteks mitigasi bencana. Hal ini mencakup penggunaan pendekatan sistematis untuk mengurangi risiko bencana, melindungi nyawa dan harta benda, serta membangun ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana.

Penelitian (Fitriani et al., 2021), berjudul "Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat" mengidentifikasi empat tahapan manajemen mitigasi bencana, yaitu; pertama, menetapkan pendekatan mitigasi bencana. Kedua, menetapkan kebijakan mitigasi bencana. Ketiga, menetapkan strategi mitigasi bencana dan keempat, aktivitas mitigasi bencana.

METODE PENELITIAN

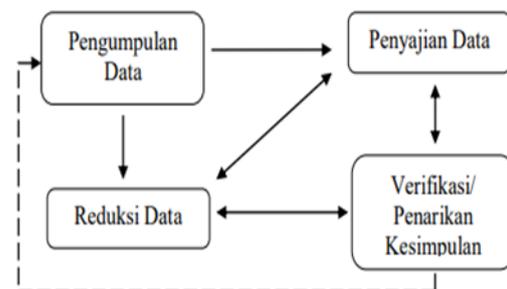
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diungkap melalui analisis statistik atau dalam bentuk angka. Metode deskriptif digunakan untuk mengungkap nilai dari masing-masing variabel, baik itu satu variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan secara independen, tidak melibatkan hubungan atau perbandingan dengan variabel lainnya (Mertha Jaya, 2021). Lokasi penelitian berada di Kantor BPBD Muratara, yang terletak di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebagai metode pemilihan sampel yang memanfaatkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Mertha Jaya, 2021). Berikut ini merupakan kriteria yang sudah diidentifikasi untuk memilih informan yaitu pihak (pejabat pemerintah, petugas penanggulangan bencana dan relawan) yang terlibat dalam upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, seperti:

- a) Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Unsur Pelaksana BPBD Muratara.
- b) Koordinator TRC Kelompok Jabatan Unsur Pelaksana BPBD Muratara.
- c) Kepala Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muratara.

- d) Kabid Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muratara.
- e) Kabid Data dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Muratara.
- f) Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Muratara.
- g) Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Muratara.
- h) Perangkat Kecamatan Karang Dapo dan Kecamatan Rawas Ilir Muratara.

Peneliti menggunakan dua jenis data sekaligus dalam pengumpulan data. Pertama, data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian, dimana beberapa pertanyaan diajukan untuk mendapatkan informasi. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan atau *library research* dan dokumentasi. (Mertha Jaya, 2021). Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai pendekatan untuk menguji keabsahan data dengan memeriksa dan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda (Winarni, 2018). Kemudian menurut Miles & Huberman (1984), Proses analisis dalam penelitian terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).



Gambar 1. Alur Analisis Data Kualitatif

Sumber : (Sugiyono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Kinerja BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Mitigasi Bencana Banjir

Manajemen kinerja merupakan pendekatan manajemen yang fokus pada pencapaian kinerja. Pendekatan ini melibatkan proses komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, menciptakan visi bersama, dan menerapkan pendekatan strategis serta terpadu. Semua ini bertujuan untuk menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai tujuan organisasi. (Wibowo, 2016). BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana secara preventif, tepat dan mitigasi bencana melalui penyadaran

masyarakat dan peningkatan kemampuan masyarakat terhadap ancaman bencana. Mencapai hasil yang diinginkan dari aktivitas tersebut, diperlukan upaya manajemen yang efektif dalam pelaksanaannya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat tahapan manajemen mitigasi bencana banjir menurut (Fitriani et al., 2021) yakni:

a) Menetapkan Pendekatan Mitigasi Bencana Banjir

Terdapat dua pendekatan yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muratara dalam upaya mitigasi bencana banjir. Pendekatan pertama adalah pendekatan struktural, yang melibatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur mitigasi banjir seperti jembatan dan dinding penahan tebing (bronjong). Tujuan dari pendekatan ini adalah mengurangi aliran air ke permukiman penduduk. Meskipun demikian, pendekatan struktural ini belum efektif dalam menangani masalah aliran air ke permukiman penduduk, sehingga peristiwa banjir tetap terjadi.



Gambar 2. Pembangunan Dinding Penahan Tebing di Kec. Rawas Ulu tahun 2020

Sumber : BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Pendekatan kedua adalah pendekatan non-struktural yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muratara melalui koordinasi antara pemangku kepentingan di forum rapat koordinasi (rakor) yang bertujuan untuk mengantisipasi bencana banjir. Selain itu, penyebaran informasi melalui platform media sosial seperti Facebook dan grup WhatsApp juga telah dijalankan dengan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Namun dalam aspek penyebaran

informasi potensi bencana banjir belum maksimal karena *Early Warning System* yang belum digunakan.

Kebijakan mitigasi baik struktural maupun non struktural harus saling mendukung. Pembangunan untuk memprediksi, mengantisipasi, dan mengurangi risiko bencana harus diimbangi dengan pembuatan tata ruang kota, peningkatan kapasitas masyarakat, bahkan hingga mengaktifkan berbagai kegiatan lain yang berguna untuk penguatan kapasitas Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah rawan bencana. Namun nyatanya infrastruktur yang telah dilaksanakan belum diimbangi dengan pengaturan tata ruang/penggunaan lahan dan program peningkatan kapasitas masyarakat seperti Destana dan Satuan Sekolah Aman Bencana.



Gambar 3. Sosialisasi dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam tahun 2018

Sumber : Olahan Peneliti

b) Menetapkan Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir

Kebijakan yang digunakan oleh BPBD Muratara dalam penanggulangan bencana banjir disampaikan melalui Bapak Mathir selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara (Selasa, 18 Juli 2023), yang mengungkapkan bahwa :

“...Dalam penanggulangan bencana banjir, BPBD Muratara mengadopsi Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana merupakan kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara yang saat ini sedang difokuskan. Kedua kebijakan tersebut merunut pada PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana kemudian PP No. 21 Tahun 2008 berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.”
 Sumber : Olahan Peneliti

Merujuk pernyataan tersebut, implementasi mitigasi bencana banjir, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012, belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Perda penanggulangan bencana dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya mitigasi bencana banjir seperti; ketersediaan pedoman, kurangnya anggaran dan sumber daya, kurangnya koordinasi dan kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat.

Adapun kebijakan lainnya yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008, Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 karena belum diterbitkannya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah oleh BPBD Muratara untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

c) Menetapkan Strategi Mitigasi Bencana Banjir

Menurut (Fitriani et al., 2021), Untuk menjalankan kebijakan tersebut, dirumuskan enam strategi berikut ini:

1) Pemetaan

BPBD Muratara untuk saat ini dalam proses pembuatan pemetaan kawasan rawan banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara. hal ini selajen dengan keterangan dari wawancara dengan Bapak Eka selaku Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara (Senin, 31 Juli 2023) yaitu:

“...Pemetaan daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara oleh BPBD saat ini pada tahap pembuatan, kami telah mengetahui daerah mana yang langganan banjir dan pemetaan ini juga sebagai wujud dari kajian risiko bencana daerah.” Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan keterangan tersebut, pemetaan belum terlaksana dengan optimal, karena peta wilayah rentan terhadap banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia.

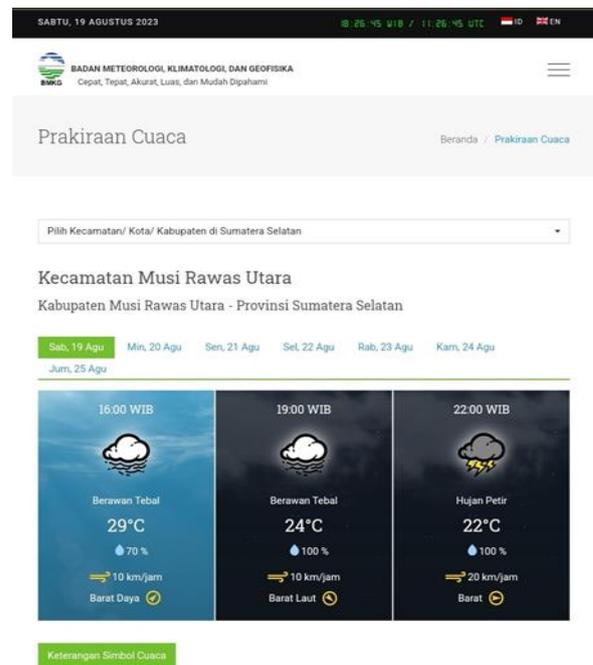
2) Pemantauan

Kegiatan pemantauan berdasarkan SOP Pemantauan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh BPBD Muratara terlaksana dengan baik melalui agenda rutin monitoring debit Sungai Rupit dan

Sungai Rawas oleh Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) saat musim hujan tiba dan informasi curah hujan yang diterima dari BMKG Provinsi Sumatera Selatan di grup *Whatsapp* maupun pengecekan di *website* BMKG Indonesia. Namun dilaksanakan dengan baik namun kurang optimal dari aspek identifikasi potensi bencana banjir karena belum menggunakan teknologi dalam pengukuran debit air Sungai Rupit dan Sungai Rawas.



Gambar 4. Pemantauan Debit Air Sungai Rupit oleh TRC BPBD
 Sumber : (Muratara, 2022a)



Gambar 5. Informasi Prakiraan Cuaca di Kabupaten Musi Rawas Utara
 Sumber : (BMKG, 2023)

3) Penyebaran Informasi

Terdapat dua jenis informasi yang disebarkan oleh BPBD dalam mitigasi bencana banjir yaitu; informasi potensi bencana disampaikan melalui hasil kecocokan antara prakiraan cuaca dan monitoring debit air di musim penghujan oleh TRC BPBD Muratara. Selanjutnya diteruskan kepada perangkat kecamatan, desa dan masyarakat menggunakan grup *whatsapp*, *facebook*, media elektronik (*sumeks.co*) dan media cetak (*muratara express*). Kemudian informasi daerah rawan banjir melalui poster, pamflet atau baliho di titik-titik langganan banjir.

Artinya, kedua informasi tersebut telah disampaikan kepada masyarakat oleh BPBD Muratara. Namun diseminasi informasi potensi bencana banjir belum terlaksana dengan efektif karena adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi karena belum menggunakan teknologi seperti sirine atau alarm bencana.



Gambar 6. Penyebaran Informasi Potensi Bencana melalui Media Elektronik

Sumber : (Zulkarnain, 2022)



Gambar 7. Plang Himbauan Kawasan Rawan Bencana Banjir

Sumber : Olahan Peneliti

4) Sosialisasi dan Konseling

Pembelajaran dan pengenalan tentang mitigasi bencana banjir melalui pendekatan yang tepat kepada masyarakat di wilayah rawan bencana banjir merupakan kewajiban bagi BPBD Muratara dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkelanjutan. Sosialisasi dan konseling yang telah dilakukan oleh BPBD Muratara belum terlaksana dengan baik, hal ini didukung dengan pernyataan dari wawancara bersama Ibu Iis Lisandra selaku Staf Kesejahteraan Sosial Camat Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara (20 Juli 2023), yaitu :

"...Saat ini pihak Kecamatan belum terlibat dalam forum diskusi publik bersama Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Karang Dapo."

Sumber : Olahan Peneliti

Sejalan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan wawancara dengan Bapak Fikriyadi selaku Staf Pemerintahan dan Camat Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (20 Juli 2023), mengatakan bahwa:

"...Saat ini kami belum terlibat koordinasi dari aspek mitigasi bencana, namun pasca banjir pihak kecamatan akan melaporkan hasil pendataan masyarakat terdampak untuk diberikan penanganan." Sumber : Olahan Peneliti

Menurut keterangan dari wawancara tersebut, diketahui bahwa sosialisasi dan konseling mitigasi bencana banjir oleh BPBD Muratara belum terlaksana dengan maksimal tidak ada program atau kegiatan yang berfokus

untuk mengurangi tingkat risiko bencana yang melibatkan kontribusi masyarakat melalui koordinasi dengan perangkat kecamatan. Hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasi dan konseling adalah tentang hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa saja yang perlu dilakukan dan dihindari di daerah rawan bencana, serta mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

5) Pelatihan atau Pendidikan

Fokus pelatihan dan pendidikan mitigasi bencana banjir dilakukan dengan sosialisasi, tata cara evakuasi, dan pendataan masyarakat. Hal ini selaras dengan wawancara bersama Bapak Hepri Hariyanto selaku Koordinator TRC Kabupaten Musi Rawas Utara (Senin, 7 Agustus 2023):

"...Jenis pelatihan yang diberikan adalah manajemen bencana (sosialisasi) dan peningkatan kapasitas TRC (penggunaan peralatan penanggulangan bencana banjir, evakuasi korban, pertolongan pertama korban bencana banjir dan pendataan masyarakat terdampak". Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan dan pendidikan TRC belum terlaksana dengan maksimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana siaga bencana yang dimiliki oleh BPBD Muratara dan belum adanya pengembangan kapasitas TRC di tahun 2023. Pelatihan terakhir dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022.



Gambar 8. Pelatihan TRC BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara
 Sumber : (Muratara, 2022b, 2022c)

6) Peringatan Dini

Peringatan dini tentunya berkaitan pada penyebaran informasi dan sosialisasi. Berdasarkan pemaparan kedua poin tersebut, peringatan dini dilakukan oleh BPBD di tahapan penyampaian informasi potensi bencana banjir kepada Masyarakat belum terlaksana dengan efektif. Karena upaya peringatan dini menggunakan teknologi seperti sensor ketinggian air, alarm bencana dan jalur evakuasi bencana untuk saat ini belum digunakan oleh BPBD Kabupaten Muratara. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Hepri Hariyanto selaku Koordinator TRC Kelompok Jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Muratara (Senin, 7 Agustus 2023) menjelaskan bahwa :

"...Pengukuran debit air Sungai Rawas dan Sungai Rupit oleh TRC BPBD Muratara masih dilakukan secara manual dengan melihat ketinggian air di tiang penyangga jembatan. Jika ketinggian air berada di titik tertentu pada tiang jembatan maka potensi akan banjir segera diberitahukan kepada masyarakat yang berada di hilir Sungai Rupit dan Sungai Rawas." Sumber : Olahan Peneliti

Adapun upaya peringatan dini lainnya yaitu relokasi bangunan yang berada di wilayah langganan banjir, namun belum juga terlaksana karena belum adanya regulasi yang memuat pelaksanaan kegiatan tersebut di tingkat Pemerintah Daerah. Kendala relokasi tersebut disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Alex selaku Staf Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muratara (24 Juli 2023), bahwa :

"...Relokasi atau sterilisasi pastinya akan menimbulkan konflik bagi masyarakat di area tersebut, maka kebijakan dari pimpinan daerah sangat dibutuhkan untuk menghadapi hambatan ini." Sumber: Olahan Peneliti

Selanjutnya, kendala relokasi juga disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Dwi Irawan selaku Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muratara dalam (25 Juli 2023) yaitu:

"...Pada saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) membuat rencana relokasi atau sterilisasi lahan dari perumahan masyarakat yang berada di pinggir sungai rawas dan sungai rupit. Jarak perumahan dari bibir sungai diharapkan sekitar 10-15 meter. Rencana untuk relokasi

perumahan masyarakat ketempat aman atau lebih tinggi telah disiapkan, namun menunggu kebijakan atau intruksi dari pimpinan daerah dalam pelaksanaannya.” Sumber : Olahan Peneliti

d) **Aktivitas Mitigasi Bencana**

Peran yang telah dilaksanakan oleh BPBD Muratara dalam aktivitas mitigasi bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi; *pertama*, identifikasi dan pemantauan risiko bencana banjir (monitoring debit air Sungai Rawas dan Sungai Rupit oleh TRC). *Kedua*, pelaksanaan fisik (pembangunan) dan non fisik (sosialisasi dan himbauan) dalam penanggulangan bencana banjir. *Ketiga*, pengelolaan sumber daya yang dimiliki seperti aset daerah, alat dan sarana serta sumber daya manusia.

Berbagai aktivitas mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh BPBD tersebut, belum tercapai dengan optimal karena RPB yang memuat kajian risiko bencana dan rencana kontingensi, program mitigasi bencana banjir, koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* belum diterbitkan oleh BPBD Muratara dalam penanggulangan bencana banjir.

Kendala Manajemen Kinerja BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Banjir

BPBD Muratara belum memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) digunakan sebagai panduan dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Padahal RPB berperan penting karena memuat Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Kontingensi (RK), program peningkatan kapasitas masyarakat serta koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* melalui pembagian tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Belum adanya RPB yang diterbitkan oleh BPBD Muratara berdampak negatif pada pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara, meliputi:

- a. Tidak terdapat program dan kegiatan yang difokuskan untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Musi Rawas Utara, seperti program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Sekolah Aman Bencana.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana mitigasi bencana.

- c. Tidak maksimalnya kegiatan pelatihan dan panduan teknis yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia yang ada.
- d. Kurangnya pegawai ahli/PNS di BPBD Muratara.
- e. Belum tersedianya *Early Warning System (EWS)* dalam identifikasi dan diseminasi potensi bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara seperti sensor ketinggian air dan alarm bencana banjir.
- f. Tidak maksimalnya koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* dalam mitigasi bencana banjir karena belum ada pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing *stakeholders*.

PENUTUP

Manajemen kinerja BPBD Muratara dalam mitigasi bencana banjir telah dilaksanakan melalui empat tahapan ; pertama, menetapkan pendekatan. BPBD menggunakan dua pendekatan yaitu struktural melalui pembangunan infrastruktur mitigasi bencana banjir (jembatan dan dinding penahan tebing/bronjong). Adapun pendekatan non-struktural melalui sosialisasi kepada masyarakat secara tatap muka ataupun melalui perangkat kecamatan, media sosial (facebook dan whatsapp), media elektronik (sumeks.co) dan media cetak (muratara express).

Kedua, menetapkan kebijakan dengan beberapa kebijakan yang diadopsi oleh BPBD Muratara dalam mitigasi bencana banjir adalah UU Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Ketiga, menetapkan strategi mitigasi yang diupayakan oleh BPBD Muratara meliputi; pemantauan (dilakukan oleh TRC), penyebaran informasi (pamflet/baliho, media sosial facebook dan whatsapp, media elektronik sumeks.co dan media cetak muratara express), dan pelatihan TRC terkait manajemen bencana.

Terakhir adalah aktivitas mitigasi bencana banjir oleh BPBD meliputi; identifikasi dan pemantauan risiko bencana banjir melalui monitoring TRC, pelaksanaan fisik (pembangunan) dan non fisik (sosialisasi dan himbauan) dalam penanggulangan bencana banjir dan pengelolaan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun sarana dan prasarana.

Keempat tahapan manajemen kinerja BPBD Muratara yang sudah diterapkan dalam mitigasi

bencana banjir belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya program dan kegiatan yang difokuskan untuk mengurangi risiko bencana, kurangnya sarana dan prasarana mitigasi bencana, tidak maksimalnya kegiatan pelatihan SDM, minimnya pegawai ahli/PNS, belum tersedianya Early Warning System (EWS) dan tidak maksimalnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders dalam mitigasi bencana banjir.

Kendala utama dalam manajemen kinerja BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya mitigasi bencana banjir tersebut, karena dasar perencanaan berupa dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang belum diterbitkan oleh BPBD Muratara. RPB ini berperan penting dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir yang memuat aspek Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Kontingensi (RK), anggaran, program atau kegiatan serta koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders yang terlibat, seperti; organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat maupun pihak swasta.

Saran untuk BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah perlunya penyusunan RPB yang memuat Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Kontingensi (RK). Pembuatannya melibatkan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- BMKG. (2023). *Prakiraan Cuaca*. BMKG Indonesia.
https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca.bmkg?Kec=Karang_Jaya&kab=Kab._Muratara&Prov=Sumatera_Selatan&AreaID=5010741
- BPS, K. M. R. (2021). *Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka* (K. M. R. BPS (ed.)). BPS, Kabupaten Musi Rawas.
- Fauzi, A., & Nugroho, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., & Bagianto, A. (2021). Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 91–111.
- Mertha Jaya, I. M. L. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (F. Husaini (ed.); Cetakan Ke). Quadrant.
- Muratara, T. B. (2022a). *Giat BPBD Muratara Pemantauan Debit Air Sungai Rupit*. BPBD Muratara.
<https://www.facebook.com/100028078455303/posts/pfbid07bsP3qi7R657sSnoVjheAxbdoCrsHnAjQYw7xDQqDSUr2R7HASVHzT5JYJwr8mWl/?app=fbl>
- Muratara, T. B. (2022b). *Pelatihan Pengembangan Kapasitas TRC*. BPBD Muratara.
<https://www.facebook.com/100028078455303/posts/pfbid02gswRKbt2u6uwEB4bcFkUVsQvLEgfy6Q27DBUCb875NV4DDVNa3j3NUZbLRb6oKD5l/?app=fbl>
- Muratara, T. B. (2022c). *Pelatihan Pengembangan Kapasitas TRC (Water Rescue)*. BPBD Muratara.
<https://www.facebook.com/100028078455303/posts/pfbid0eNagH5EAft1rhVsX3BAFdiJ2AgiupQH97sUngZrb6mNFBJKHMnWXe5LqtuZoUWCil/?app=fbl>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suprihanto, J. (2018). *Manajemen*. UGM Press.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja* (Kelima). Rajawali Press.
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (R. A. Kusumaningtyas (ed.); Cetakan Pe). Bumi Aksara.
- Zulkarnain. (2022). *BPBD Muratara Ingatkan Warga Waspadaai Bencana Banjir dan Angin Kencang*. Sumeks.Co.
<https://sumeks.disway.id/read/647447/bpd-muratara-ingatkan-warga-waspadaai-bencana-banjir-dan-angin-kencang>